

LAPORAN KINERJA 2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI



**LAPORAN KINERJA (LKj) 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DUMAI**

Tahun Anggaran 2023

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja (LKJ) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Diharapkan penyajian LKJ ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Kami menyadari, dalam melaksanakan tugas sesuai bidang yang menjadi tanggung jawab masih ada kelemahan dan kekurangan, maka dari itu kami menerima saran dan kritik yang membangun demi pelaksanaan tugas agar lebih baik lagi.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Dumai

YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19840511 200212 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis, Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai tahun 2022-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Dari sasaran-sasaran yang telah termuat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dapat dilihat program-program yang dilaksanakan telah mencapai sasaran yang di harapkan sampai dengan tahun 2022. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan kewenangan dibidang keamanan, dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan dan peraturan /keputusan Walikota serta perlindungan Masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi	2
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Sumber Daya Manusia	4
D. Keuangan	6
E. Sarana Prasarana.....	6
F. Permasalahan Utama (Strategic Issue)	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Perencanaan Kerja	9
B. Perjanjian Kinerja.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
1. Pengukuran Kinerja	13
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	16
B. Realisasi Anggaran.....	17
BAB IV PENUTUP	19
A. Kesimpulan	19
B. Permasalahan.....	20
C. Saran	21
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi	2
Gambar 1.2 Data Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai	4
Gambar 1.3 PNS Satpol PP Kota Dumai Berdasarkan Golongan.....	5
Gambar 1.4 PNS Satpol PP Berdasarkan Jenjang Pendidikan	5

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	6
Tabel 1.2 Sarana Prasarana	7
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan	10
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	11
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja	15
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	15
Tabel 3.3 Pencapaian Realisasi Kinerja Berdasarkan Sasaran	16
Tabel 3.4 Pencapaian Realisasi Kinerja dan Anggaran.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai diharapkan dapat:

- a. Memberikan Informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Walikota Dumai atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
- b. Mendorong Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Sebagai Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai untuk meningkatkan kinerjanya
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 47 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KOTA DUMAI



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 yang terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - i. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - ii. Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - i. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - ii. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - iii. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari:
 - i. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - ii. Seksi Pemantauan dan Tindak Internal; dan
 - iii. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:
 - i. Seksi Satlinmas;
 - ii. Seksi Data Informasi dan Pelatihan; dan

iii. Kelompok Jabatan Fungsional

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, pada Pasal 3 Disebutkan “Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat”.

Kemudian dalam penyelenggaraan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai mempunyai fungsi:

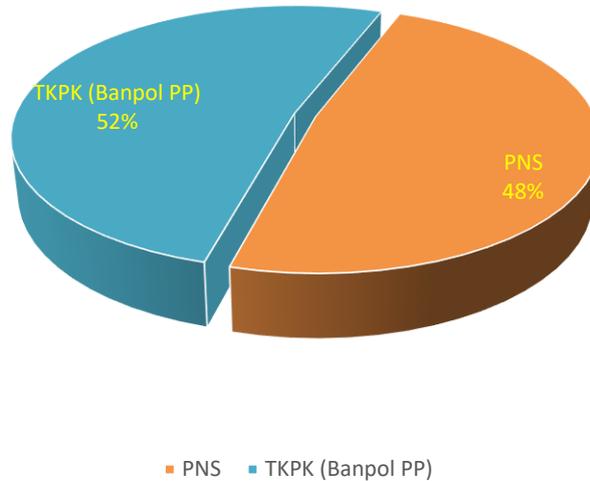
- a. perencanaan dan perumusan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat;
- b. pemimpinan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah dan atau aparatur lainnya;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali kota;
- f. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemerintahan Dalam Negeri (penegakan Peraturan Daerah);

- g. pengikutan proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- h. pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan tamu negara;
- i. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wali kota;
- k. pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
- l. pembinaan dan pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi;
- m. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat;

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah personil di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai saat ini berjumlah 59 orang pegawai negeri sipil serta 63 orang TKPK Bantuan Polisi Pamong Praja. Komposisi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Data Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

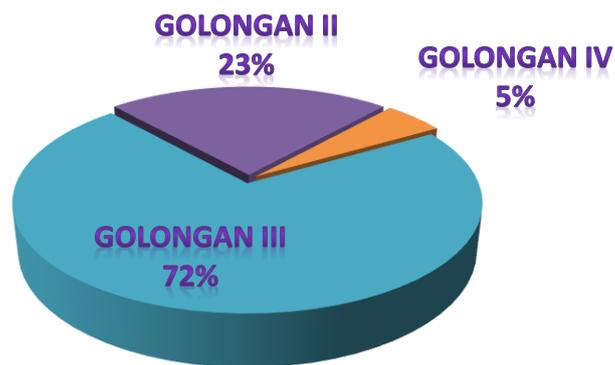


Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Gambar 1.2

PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, apabila di bedakan berdasarkan Golongan terdiri dari Golongan IV sebanyak 3 Orang, Golongan III sebanyak 43 Orang dan Golongan II sebanyak 14 Orang

PNS Satpol PP Kota Dumai Berdasarkan Golongan

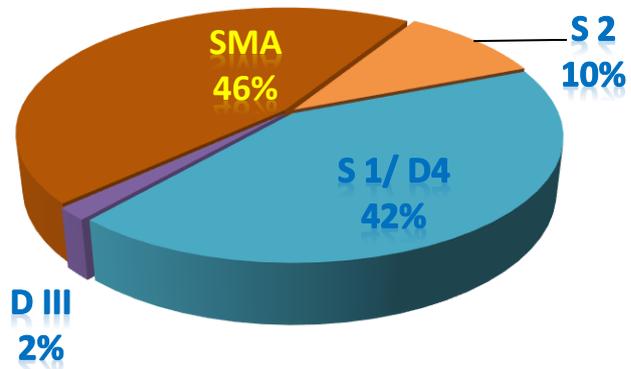


Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Gambar 1.3

Sedangkan bila di data menurut Jenjang Pendidikan adalah Strata 2 (S2) terdiri dari 6 Orang, Sarjana (S1/ D4) terdiri dari 25 Orang, D3 terdiri dari 1 Orang, dan SMA terdiri dari 27 Orang.

PNS Satpol PP Kota Dumai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Gambar 1.4

D. KEUANGAN

Dalam Rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun Anggaran 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022*

5	Belanja Daerah	
5.1	Belanja Operasi	9.564.215.428
5.1.01	Belanja Pegawai	6.749.764.328
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	2.814.469.100
5.2	Belanja Modal	39.149.600
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.149.600
	Jumlah Belanja	9.603.365.028

Sumber : DPPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai TA. 2022

E. SARANA PRASARANA

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai adalah :

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai terletak di Jalan Brigjen H.R. Soebrantas Kota Dumai.

b. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai saat ini dapat di lihat di tabel Berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai
Tahun Anggaran 2022

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH UNIT	KONDISI		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Mobil Patroli	2	1	1	
2	Mobil PAMWAL	2	1		1
3	Mobil DALMAS	1			1
4	Mobil Pendukung Operasional	3	2	1	
5	Sepeda Motor	4	4		

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

F. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)

Sejalan dengan upaya pembangunan Kota Dumai, maka Stabilitas keamanan dan ketertiban di Daerah Kota Dumai menunjukkan adanya perubahan perubahan ke arah yang lebih baik, namun demikian kiranya masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih baik. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kota Dumai.

Kota Dumai sebagai Daerah Otonom dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat yang tentu saja mengharapkan adanya perubahan, permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kota Dumai secara umum hampir sama dengan daerah lainnya antara lain:

1. Masih kurangnya SDM yang berkompetensi dalam Penegakkan Peraturan Daerah khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
2. Koordinasi antar instansi lemah;
3. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Belum maksimalnya Pengawasan dan Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
5. Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Dumai yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan masyarakat;
6. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana yang belum memadai;
7. Jumlah anggota Satpol PP yang belum memadai;
8. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat;
9. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
10. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan;
11. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan;
12. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba;
13. Kenakalan remaja dan pelajar;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan

Proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan telah melalui berbagai tahapan, mulai dari penetapan sasaran strategis, penetapan program, penetapan kegiatan hingga berlanjut pada penetapan target kinerja. Untuk penetapan sasaran strategis, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai telah menetapkan sasaran strategis yang ingin di capai pada Tahun 2022 dengan mengidentifikasi indikator kinerja yang akan di jadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran strategis beserta indikator kinerja disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	%	100
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan).	%	100
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah.	%	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan Anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Satpol PP tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	%	100
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan).	%	100
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah.	%	100

Sasaran

Program

Anggaran

1	Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	462.443.804
---	--	--	-------------

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai 2022–2026, Perjanjian Kinerja disusun setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja ini menjabarkan target yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahun 2022 merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2022.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu institusi pemerintah di jajaran Pemerintahan Kota Dumai, tetap konsisten dan terus berupaya sedapat mungkin untuk melakukan pembenahan diri dengan semakin fokus dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sesuai tuntutan perubahan lingkungan yang terjadi di wilayah Kota Dumai. Untuk itulah maka dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah di Kota Dumai, dan Kebijakan Kepala Daerah.

Heterogenitas masyarakat Kota Dumai dengan beragam latar belakang suku, ras, agama, pendidikan dan sebagainya, memiliki peluang yang besar terhadap terjadinya konflik komunal, bila tidak dikelola dengan baik. Satuan Polisi Pamong Praja harus berperan aktif dan profesional di bidang ketentraman, ketertiban dan penegakkan Perda dan kebijakan Kepala Daerah.

Upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Dumai sangat perlu dilakukan mengingat keamanan dan ketertiban merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam mensukseskan penyelenggaraan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut dalam upaya mencapai sasaran peningkatan Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban telah diambil kebijakan Melaksanakan penegakan produk hukum dan taat hukum bagi masyarakat dengan meningkatkan kinerja pengawasan, melaksanakan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Perda.

Dalam mengimplementasi kebijakan yang telah diambil yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas-tugas rutin yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, juga mendapat dukungan/kerjasama dari beberapa unsur terkait seperti TNI/Polri, Kejaksaan dan Pengadilan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran, program dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimateoutcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- a. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil (SB)
- b. $70 \leq X < 85$: Berhasil (B)
- c. $55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil (CB)
- d. < 55 : Tidak Berhasil (TB)

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes). Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai tahun 2022 per sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	100 %	100%	100%
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan).	100%	100%	100 %
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah.	100%	100%	100 %

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai pada beberapa tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	2	3	4
1	Sangat Berhasil	3	100%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai capaian kinerja indikator kinerja utama sangat berhasil sebanyak 3 (tiga) indikator dengan capaian sebesar 100%.

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Capaian Kinerja	Jumlah Sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	1	100 %
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-

Dari 1 (satu) Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai capaian kinerja sasaran sangat berhasil sebanyak satu sasaran dengan capaian sebesar 100%

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran Meningkatkan Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat bertujuan menjamin kondisi dinamis di Kota Dumai agar tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan rasa aman, nyaman dan tentram serta Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program program pembangunan berjalan dengan aman dan lancar sehingga rencana strategis yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan visi Kota Dumai “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu” tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 ini. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran

tersebut. Dari sasaran strategis yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai telah berhasil mewujudkan hampir seluruh sasaran tersebut. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan adalah 100%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja dikarenakan pelaksanaan strategi antara lain :

1. Pemberdayaan jumlah personil yang dimiliki dengan pemberian motivasi kerja yang intensif yang dilakukan oleh pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai;
2. Mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang terbatas untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mendesak dan urgen dalam mewujudkan sasaran Pelayanan Publik Dibidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat secara maksimal;
3. Memaksimalkan kemampuan personil Polisi Pamong Praja dalam mendukung kegiatan operasional maupun kegiatan administrasi;
4. Mengatur personil Polisi Pamong Praja secara bergantian untuk kegiatan administrasi dan kegiatan operasional dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
5. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada dengan selalu mempertimbangkan skala prioritas untuk mencapai sasaran organisasi agar mendukung tercapainya visi misi Kota Dumai.

b. Kegagalan

Faktor kegagalan pencapaian indikator kinerja dikarenakan pelaksanaan strategi antara lain :

1. Luas wilayah Kota Dumai mengakibatkan daya jangkau pelayanan patroli wilayah belum optimal untuk menysasar

keseluruh wilayah dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

2. Terbatasnya anggaran mengakibatkan berkurangnya biaya operasional untuk melaksanakan kegiatan patroli wilayah dan penegakan peraturan daerah dalam kegiatan yustisi;
3. Terbatasnya jumlah sarana dan perlengkapan dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seperti terbatasnya jumlah kendaraan dinas dalam pelaksanaan tugas patroli pengawasan, pengamatan dan penyelidikan;
4. Terbatasnya ASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti Diklat, Pelatihan, kursus maupun Bimtek baik teknis maupun fungsional sehingga tingkat kompetensi ASN dalam pelaksanaan tugas menjadi terbatas tentu akan berdampak pada semakin kecilnya Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Satpol PP Kota Dumai.

c. Solusi

Solusi untuk mengatasi kegagalan pencapaian indikator kinerja dikarenakan pelaksanaan strategi antara lain :

1. Pembinaan personil yang intensif secara berjenjang dan terus menerus yang dilakukan oleh pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai;
2. Mengusulkan peningkatan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Merencanakan peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan daya jangkau pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah Kota Dumai.
4. Mengusulkan pada Instansi terkait untuk mengikutsertakan ASN di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja pada kegiatan Diklat, pelatihan, maupun sejenisnya untuk meningkatkan kompetensi ASN.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2022 alokasi APBD Kota Dumai untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai sebesar **Rp. 9.603.365.028,-** dialokasikan untuk **program urusan wajib** sebesar **Rp 462.443.804,-** dengan penyerapan anggaran sebesar **Rp. 462.427.904,-** atau **99,99%**.

Uraian pencapaian realisasi keuangan berdasarkan program urusan wajib tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

*Pencapaian Realisasi Kinerja dan Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2022*

N O	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 333.574.804	Rp 333.558.904	99,99%
	1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp 282.060.000	Rp 282.060.000	100%
	2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 35.458.900	Rp 35.443.000	99,96%

		3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp 16.055.904	Rp 16.055.904	100%
	2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Rp 128.869.000	Rp 128.869.000	100%
		1	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 28.000.000	Rp 28.000.000	100%
		2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 100.869.000	Rp 100.869.000	100%
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM/ KEGIATAN UTAMA				Rp 462.443.804 ,-	Rp. 462.427.904 ,-	99,99%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai

BAB IV PENUTUP

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi, hal ini tercermin dari dapat dilaksanakannya tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2022-2026 yang harus diwujudkan dalam tahun 2022 melalui pelaksanaan 2 (dua) program 10 (sepuluh) kegiatan dan 31 (tiga Puluh Satu) sub Kegiatan. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Satpol PP Kota Dumai beserta dukungan para staf dilingkungan Satpol PP Kota Dumai untuk mencapai sasaran yang ditetapkan tahun 2022, disamping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait. Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai disusun dengan terciptanya sentral Administrasi Pemerintah Daerah yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta memberikan pelayanan Administrasi kepada seluruh perangkat Kota Dumai yang semakin andal dan berkualitas tinggi, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis.

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab – bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, telah ditetapkan sasaran dan kebijakan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan anggaran yang tersedia.
2. Dari jumlah anggaran yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai berupa Belanja Operasi sebesar **Rp. 9.564.215.428,-** (sembilan milyar lima ratus enam puluh empat juta dua ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah, serta belanja modal sebesar **Rp. 39.149.600,-** (tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) persentase capaian target adalah **91,96%** atau sebesar **Rp. 8.795.649.835,-** (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta

enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

3. Secara umum capaian indikator kinerja sasaran realisasinya 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian berarti pencapaian Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai berada pada penilaian “BAIK”, karena rentang nilainya lebih besar dari 75 %.
4. Selama melaksanakan kegiatan tidak ada ditemui hambatan dan permasalahan yang berarti, walaupun ada namun dapat diatasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
5. Walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada ditemui hambatan dan permasalahan yang berarti, namun untuk mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Terdepan dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Perda, masih banyak hambatan dan permasalahan yang perlu diatasi terutama dalam pelaksanaan tugas pengamanan dan penertiban umum serta penegakan Perda. Dalam pelaksanaan tugas pengamanan dan penertiban umum masih dirasakan kekurangan tenaga atau personil dan tingkat pengetahuan/ keterampilan anggota masih perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia. Untuk itu pada tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai mengusulkan untuk tetap melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah.

B. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022, ditemukan hambatan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengelolaan baik dalam kegiatan maupun dalam penanganan masalah keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Dumai.
2. Kurangnya sarana penunjang Satuan Polisi Pamong Praja seperti kendaraan operasional dan pendukung lainnya.
3. Masih kurangnya PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) di lingkungan Satpol PP.

C. SARAN

Adapun yang menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mendata segala kebutuhan terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satpol PP seperti pelaksanaan diklat–diklat maupun melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana, mendata segala kebutuhan mengecek jumlah aset yang masih bisa dipakai dan tidak dipakai, melaksanakan pengadaan alat–alat yang dibutuhkan selama penanganan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kota Dumai.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2022 ini disampaikan, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, Januari 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA DUMAI**

YUDA PRATAMA PUTRA, S.STP

Pembina Tk. I

NIP. 19840511 200212 1 001